

REHABILITASI PASCABENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Casey Kirey Malonda

NPP. 32.0817

Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: 32.0817@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Sutiyo, S.STP, M.Si, Ph.D

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Minahasa Regency is an area with a high level of landslide vulnerability, with the number of incidents continuing to increase from year to year, even reaching 139 cases in just the first seven months of 2024. Although the local government has made various post-disaster rehabilitation efforts, such as repairing infrastructure and providing social assistance, the implementation has not been optimal. The main problems faced include weak coordination between related agencies, limited competent human resources, lack of supporting infrastructure, and the lack of an integrated and sustainable approach in the rehabilitation process.. **Method:** This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The theory applied is the rehabilitation theory of Eviany and Sutiyo (2023), which consists of physical infrastructure rehabilitation and non-physical function rehabilitation. **Result:** The research findings indicate that the implementation of post-landslide disaster rehabilitation in Minahasa Regency has encompassed both physical infrastructure rehabilitation and non-physical function rehabilitation. However, the execution of these rehabilitation efforts has not been optimal and still faces various obstacles, including a lack of effective coordination among relevant agencies, limited availability of competent human resources, and inadequate supporting infrastructure. **Conclusion:** The post-landslide disaster rehabilitation in Minahasa Regency has been implemented but has not yet reached full optimization. To enhance the effectiveness of the rehabilitation process, it is recommended to improve inter-agency coordination, strengthen human resource capacity, and optimize the role of relevant local government agencies..

Keywords: Post-Disaster Rehabilitation, Disaster, Disaster Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Minahasa merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tanah longsor yang tinggi, dengan jumlah kejadian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan mencapai 139 kasus hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2024. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi pascabencana, seperti perbaikan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya infrastruktur pendukung, serta belum diterapkannya pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan dalam proses rehabilitasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi pascabencana tanah longsor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori rehabilitasi Eviany dan Sutiyo (2023), yang terdiri dari rehabilitasi infrastruktur fisik dan rehabilitasi fungsi non fisik. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa telah mencakup rehabilitasi infrastruktur fisik dan rehabilitasi fungsi non fisik. Namun, pelaksanaan rehabilitasi tersebut belum optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur pendukung yang memadai. **Kesimpulan:** Rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa sudah terlaksana namun belum sepenuhnya optimal. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi pascabencana, disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan peran perangkat daerah terkait. **Kata Kunci :** Rehabilitasi Pascabencana, Bencana, Manajemen Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki kondisi geografis yang membuatnya sangat rentan terhadap berbagai bencana. Keragaman bencana yang terjadi di Indonesia meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, yang masing-masing memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Bencana alam, khususnya, sangat dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan "Ring of Fire," sebuah jalur vulkanik aktif yang membentang di sepanjang Samudra Pasifik. Melihat dari kondisi topografi yang menunjukkan banyaknya kontur pegunungan yang terjal sehingga menjadi salah satu faktor peningkatan bencana hidrometeorologis di Indonesia terutama bencana tanah longsor.

Menurut MacAfee et al., p. (2024, p. 2) Tanah longsor merupakan salah satu jenis bahaya alam yang berpotensi menjadi bencana, di mana pengetahuan lokal dan ilmiah yang menggabungkan pengetahuan lokal dan ilmiah untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi secara spesifik dalam konteks tertentu dapat bermanfaat. Peristiwa tanah longsor yang sering terjadi pada penghujung dan awal tahun sejalan dengan pola curah hujan tersebut. Kenaikan intensitas curah hujan setelah periode kemarau panjang menyebabkan tanah menjadi jenuh air dengan cepat. Dalam menghadapi kerentanan terhadap bencana ini, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari dampak buruk berbagai bencana. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan upaya strategis untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana.

Menurut Ali & Mannakkara (2024) proses rehabilitasi pascabencana menjadi krusial untuk memastikan bahwa keadaan masyarakat dapat pulih dengan cepat dan mengaktifkan kembali berbagai fungsi yang terhenti atau rusak karena bencana. Tingkat literasi suatu daerah merupakan wujud dari keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan. Literasi merupakan upaya pembangunan manusia. Membangun manusia berarti membangun karakter dari suatu bangsa (Dewi & Rohman, 2019). Untuk mengelola bencana alam di Indonesia, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang bertanggung jawab di tingkat nasional. Di tingkat daerah, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) oleh kepala daerah, yang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden. Keberadaan BNPB dan BPBD menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Minahasa, dengan karakteristik geografisnya yang rawan bencana, khususnya tanah longsor, menghadapi tantangan kompleks dalam upaya rehabilitasi pascabencana. Meskipun upaya rehabilitasi telah dilakukan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Salah satu kesenjangan utama terletak pada fokus rehabilitasi yang cenderung didominasi oleh perbaikan infrastruktur fisik. Perbaikan jalan, jembatan, dan bangunan memang penting untuk memulihkan aksesibilitas dan sarana vital. Namun, rehabilitasi yang hanya berorientasi pada aspek fisik ini mengabaikan dimensi pemulihan yang lebih holistik, yaitu rehabilitasi fungsi non-fisik. Aspek-aspek seperti pemulihan psikologis masyarakat yang mengalami trauma, pemulihan sosial ekonomi melalui bantuan mata pencaharian, serta penguatan kembali jaringan sosial yang terganggu akibat bencana, seringkali kurang mendapatkan perhatian yang

proporsional. Ketidakseimbangan ini mencerminkan adanya potensi kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas kebutuhan masyarakat pascabencana.

Selain itu, efektivitas rehabilitasi juga terhambat oleh kurangnya koordinasi yang optimal antar instansi pemerintah terkait. Penanganan pascabencana melibatkan berbagai sektor, mulai dari pekerjaan umum, sosial, kesehatan, hingga ekonomi. Tanpa koordinasi yang baik, dapat terjadi tumpang tindih program, inefisiensi penggunaan sumber daya, dan keterlambatan dalam penyampaian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala serius. Anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pemulihan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan rehabilitasi pascabencana, serta kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti peralatan dan sistem informasi yang terintegrasi.

Lebih lanjut, prosedur birokrasi dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi seringkali dinilai lambat dan berbelit-belit. Proses persetujuan yang panjang dan prosedur administrasi yang kompleks dapat menunda penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pemulihan, sehingga memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan-kesenjangan ini secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya perbaikan kebijakan dan praktik rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Minahasa, sehingga pemulihan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi pengetahuan yang telah diletakkan oleh berbagai studi sebelumnya yang berfokus pada penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana, masing-masing memberikan perspektif unik dan berharga. Penelitian yang dilakukan oleh Evanly et al. (2020) di Kabupaten Minahasa, dengan judul “Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor,” memberikan wawasan krusial mengenai pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakteristik geografis suatu wilayah dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Temuan mereka yang mengklasifikasikan zona risiko longsor berdasarkan kemiringan lereng dan mengaitkannya dengan alokasi lahan pertanian serta rencana permukiman menggarisbawahi betapa esensialnya integrasi analisis risiko bencana dalam perencanaan pembangunan wilayah. Studi ini menjadi pengingat bahwa identifikasi dini kerentanan adalah langkah pertama yang tak terhindarkan dalam mengurangi dampak bencana di masa depan. Lebih lanjut, penelitian Riska (2020) yang meneliti “Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat” menyoroti pentingnya koordinasi dan kepemimpinan dalam fase pascabencana. Temuan yang menunjukkan BPBD sebagai koordinator sentral yang bekerja sama dengan berbagai pihak dan menjalankan amanat perundang-undangan menegaskan peran vital lembaga ini dalam memastikan respons yang terstruktur dan komprehensif setelah terjadinya musibah. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kesiapan sebelum kejadian, tetapi juga pada kemampuan mengelola dan mengarahkan upaya pemulihan setelahnya. Sementara itu, penelitian Rahim (2022) yang berfokus pada “Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Pascabencana Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” membuka mata terhadap tantangan nyata dalam membangun kembali infrastruktur vital setelah bencana. Identifikasi hambatan yang menyebabkan program berjalan kurang optimal memberikan pelajaran berharga mengenai kompleksitas logistik, birokrasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses pemulihan. Studi ini menekankan perlunya

strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan dalam upaya rekonstruksi.

Dari perspektif implementasi program, penelitian Sigarlaki et al. (2017) tentang “Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Banjir di Kota Manado” memberikan pandangan kritis terhadap tantangan di tingkat operasional. Temuan mengenai penyaluran bantuan yang tidak merata dan kelemahan dalam pendataan di lapangan menyoroti pentingnya sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang akurat dalam memastikan bantuan mencapai mereka yang membutuhkan. Studi ini mengingatkan bahwa niat baik dalam program pemulihan harus didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif. Sebagai penutup, penelitian Rizana & Zikri (2021) mengenai “Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pascabencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam” menawarkan perspektif yang lebih optimis dengan menunjukkan keberhasilan BPBD dalam menjalankan tugasnya. Penilaian efektivitas berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi memberikan indikator konkret mengenai praktik baik yang dapat direplikasi di konteks lain. Studi ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan, pemulihan pascabencana yang efektif adalah hal yang mungkin dicapai. Secara keseluruhan, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini mengungkapkan lanskap yang kompleks dalam studi penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana. Mereka menyoroti pentingnya pemahaman risiko, koordinasi kelembagaan, tantangan implementasi, dan potensi keberhasilan dalam upaya membangun kembali kehidupan masyarakat setelah dilanda bencana. Penelitian-penelitian ini menjadi landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif, efisien, dan adil dalam menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan Penelitian ini memiliki potensi kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diulas. Sementara studi sebelumnya memberikan wawasan berharga mengenai analisis risiko bencana, peran BPBD, implementasi program pemulihan, dan efektivitas respons di berbagai konteks geografis dan jenis bencana, penelitian ini akan menawarkan perspektif yang berbeda dan melengkapi pemahaman yang ada. Kebaruan ilmiah penelitian ini dapat terwujud melalui beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mungkin akan berfokus pada konteks geografis atau jenis bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yang belum dieksplorasi secara mendalam oleh studi-studi sebelumnya, seperti analisis risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa yang memberikan wawasan krusial mengenai pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakteristik geografis suatu wilayah dalam mengidentifikasi potensi bahaya.

Kedua, penelitian ini berpotensi meninjau variabel atau aspek baru yang belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya, seperti pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana tanah longsor, mengidentifikasi faktor penghambat, dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan. Ketiga, penelitian ini dapat mengadopsi metodologi penelitian yang inovatif, seperti penggunaan metode campuran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif atau penerapan studi kasus komparatif antar wilayah dengan karakteristik berbeda. Terakhir, penelitian ini mungkin akan menganalisis fenomena penanggulangan bencana dan pemulihan pada level analisis yang berbeda, misalnya pada tingkat individu, kebijakan, atau jaringan antar aktor. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi orisinal terhadap literatur yang ada dengan menawarkan perspektif baru, fokus pada aspek yang kurang dieksplorasi, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, atau menganalisis pada level yang berbeda, sehingga memperkaya pemahaman teoritis dan

praktik dalam bidang penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan secara rinci tahapan dan bentuk rehabilitasi pascabencana tanah longsor yang diimplementasikan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut serta merumuskan rekomendasi atau solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proses rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas proses rehabilitasi pascabencana. Teknik Pengumpulan data dilakukan berdasarkan Sugiyono (2023) yaitu dengan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah terkait (BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), tokoh masyarakat, dan warga terdampak bencana, Observasi lapangan untuk mengamati langsung kondisi wilayah terdampak dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan dokumentasi, yaitu pengumpulan dan analisis data sekunder berupa laporan, peraturan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori rehabilitasi pascabencana menurut Eviany & Sutiyo (2023) yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu rehabilitasi infrastruktur fisik (seperti perbaikan jalan, jembatan, dan perumahan) dan rehabilitasi fungsi non fisik (seperti pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat)..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah longsor terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Bangunan menjadi tidak stabil karena pergerakan tanah yang terjadi secara bertahap. Curah hujan yang intens meningkatkan massa dan melumasi lapisan tanah, yang menyebabkan tanah longsor (Hidayati & Noviana, 2024) . Tanah longsor selalu terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Minahasa, dalam rentan waktu 2022-2024 tanah longsor pada tahun 2024 menjadi bencana tanah longsor terbanyak sebanyak 139 kali dan terjadi hamper diseluruh kecamatan yang ada di Minahasa. Kebijakan pascabencana yang ditujukan untuk pembangunan kembali yang berkelanjutan harus didasarkan pada analisis komponen kerentanan yang membentuk suatu sistem dan bagaimana hal ini dapat dipengaruhi secara efektif selama fase-fase pembangunan kembali jangka pendek dan jangka panjang yang terpisah (Ingram et al., 2006).

3.1 Rehabilitasi Pascabencana Tanah Longsor

Proses pemulihan tanah longsor sering kali memakan waktu yang lama, mahal dan rumit, dan tanggung jawab proyek pemulihan didistribusikan di antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan, karena kompleksitas proses pemulihan bencana tanah longsor, proses ini menjadi lebih dikonseptualisasikan sebagai proses yang dinamis (Perera et al., 2019) . Proses pemulihan setelah bencana dapat menjadi salah satu dari penyebab dimana penduduk dihadapkan pada risiko baru. Orang-orang yang terkena bencana kerap dianggap tidak berdaya, membutuhkan bantuan eksternal penuh. Jika penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan pedoman umum dan semua penyintas

diperlakukan sama, potensi konflik sosial akan muncul dari isu ketidakadilan.

Eviany & Sutiyo (2023) menyatakan bahwa :

Rehabilitasi berarti perbaikan dan pemulihan masyarakat dan fungsi pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai untuk masyarakat beraktivitas secara normal setelah kejadian bencana. Rehabilitasi dilakukan supaya layanan dasar kembali berfungsi, rumah dapat ditinggali, infrastruktur dapat digunakan kembali, kegiatan ekonomi berjalan, dan kondisi psikologis para korban pulih. Rehabilitasi juga merupakan fase transisi antara masa tanggap darurat dan pembangunan jangka Panjang setelah bencana.

Setelah memahami arti rehabilitasi sebagai proses perbaikan dan pemulihan masyarakat serta fungsi pelayanan publik pascabencana. Upaya rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Minahasa merupakan proses multidimensional yang dibagi menjadi dua, yaitu pemulihan fisik dan non-fisik. Rehabilitasi infrastruktur fisik adalah langkah awal yang krusial, berfokus pada perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak atau hancur akibat tanah longsor. Ini mencakup perbaikan jalan dan jembatan untuk memulihkan aksesibilitas antar wilayah, pembangunan kembali permukiman yang layak huni, serta restorasi fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan. Namun, rehabilitasi yang efektif tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Rehabilitasi fungsi non-fisik sama pentingnya, mencakup pemulihan aspek sosial, ekonomi, psikologis, pemerintahan, dan pelayanan publik. Pemulihan psikologis korban melalui layanan konseling dan dukungan komunitas membantu mengatasi trauma dan membangun ketahanan mental. Bantuan ekonomi dan pelatihan keterampilan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan membangun kembali stabilitas ekonomi. Koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program rehabilitasi. Pemulihan fungsi pelayanan publik, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih, adalah kunci untuk membangun kembali kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Minahasa seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi upaya pemulihan, yaitu :

1. Terbatasnya Anggaran pada Pelaksanaan Rehabilitasi:

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Anggaran yang terbatas dapat menghambat alokasi dana yang memadai untuk perbaikan infrastruktur yang rusak, penyediaan bantuan kepada korban, serta pelaksanaan program-program pemulihan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan rehabilitasi, kurangnya kualitas infrastruktur yang dibangun, serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

2. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:

Koordinasi yang kurang efektif antarinstansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas upaya rehabilitasi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan duplikasi upaya, kesenjangan dalam layanan, kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program, serta terhambatnya aliran informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu.

3. Hambatan Birokrasi dalam Penganggaran dan Pelaksanaan:

Proses birokrasi yang kompleks dan berbelit dalam penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi dapat memperlambat upaya pemulihan. Prosedur yang panjang dan berlapis, persyaratan administratif yang rumit, serta kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran dapat

menghambat respons cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat terdampak dan menunda pelaksanaan proyek-proyek rehabilitasi yang penting.

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung:

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam manajemen bencana dan rehabilitasi merupakan tantangan serius. Kurangnya tenaga ahli di bidang konstruksi, perencanaan, psikososial, dan bidang-bidang lain yang relevan dapat menghambat kualitas dan kecepatan pelaksanaan rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti alat berat, transportasi, dan fasilitas komunikasi yang memadai juga dapat menjadi kendala dalam menjangkau wilayah terdampak bencana dan mendistribusikan bantuan secara efisien.

3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pascabencana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dan berkelanjutan untuk rehabilitasi adalah langkah penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi dapat mempercepat implementasi program dan mengurangi inefisiensi. Penguatan mekanisme koordinasi antar instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, melalui pembentukan platform koordinasi yang jelas dan efektif, dapat meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya rehabilitasi. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan dalam manajemen bencana dan rehabilitasi adalah kunci untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Optimalisasi peran Dinas Sosial dalam memberikan dukungan psikososial yang komprehensif kepada korban bencana, termasuk layanan konseling dan program pemulihan komunitas, sangat penting untuk membangun ketahanan mental dan sosial masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas internal, Dinas Sosial juga perlu membangun mekanisme koordinasi dengan instansi lain, seperti Kementerian Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena tidak hanya pihak pemerintah saja yang menawarkan program pemberdayaan, dari pihak swasta, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, dan perusahaan profit juga mampu untuk menawarkan dan menjalankan program Corporate Service Responsibility/CSR (Anggara Putri et al., 2024). Menurut Rahman et al. (2023) mengungkapkan bahwa Ormas dan LSM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat di bidang ekonomi, melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan manajemen usaha, penyediaan modal usaha, dan pemasaran produk, dalam memberdayakan masyarakat memberikan kontribusi positif mereka dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur pendukung, seperti sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik, dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelaksanaan rehabilitasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dan menemukan beberapa temuan penting terkait pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan tersebut; hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa mencakup rehabilitasi infrastruktur fisik, seperti perbaikan jalan dan jembatan, sejalan dengan temuan Rahim (2022) yang menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur sumber daya air pascabencana untuk mewujudkan ketahanan nasional, serta rehabilitasi fungsi non fisik, meskipun penelitian ini secara spesifik menyoroti tantangan dalam

rehabilitasi fungsi non fisik, seperti pemulihan psikologis korban, yang belum optimal dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, berbeda dengan temuan Rizana et al. (2021) yang menunjukkan efektivitas peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pascabencana banjir; lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Minahasa, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, hambatan birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, yang memperkuat temuan Rahim (2022) dan Sigarlaki et al. (2017) yang juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, seperti kurangnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya; untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penelitian ini mengusulkan beberapa upaya, seperti peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi peran Dinas Sosial dalam pemulihan psikologis korban, yang sejalan dengan temuan Riska (2020) yang menekankan pentingnya kerjasama BPBD dengan lembaga dan pihak terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa, serta menyoroti persamaan dan perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu rehabilitasi infrastruktur fisik dan rehabilitasi fungsi non fisik. Rehabilitasi infrastruktur fisik meliputi perbaikan jalan dan jembatan, serta pembangunan tanggul penahan longsor. Rehabilitasi fungsi non fisik mencakup pemulihan psikologis korban, pemulihan sosial ekonomi, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Pelaksanaan rehabilitasi menghadapi berbagai hambatan, antara lain terbatasnya anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, hambatan birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut meliputi peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi antar instansi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi peran Dinas Sosial dalam pemulihan psikologis korban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses rehabilitasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial dapat mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan ketahanan sosial terhadap bencana di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni fokus wilayah penelitian. Penelitian ini berfokus pada rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa, yang berarti temuan penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke konteks daerah lain dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada data dan informasi yang diberikan oleh informan dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat terdampak; potensi bias atau ketidakakuratan dalam informasi yang diberikan oleh informan tidak dapat sepenuhnya dieliminasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas cakupan wilayah studi, tidak hanya terbatas di Kabupaten Minahasa, tetapi juga mencakup daerah-daerah lain yang memiliki

karakteristik geografis dan risiko bencana serupa di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperdalam analisis mengenai efektivitas berbagai strategi rehabilitasi pascabencana, termasuk aspek pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, untuk memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Camat Kakas, dan Hukum Tua Desa Kaweng dan seluruh pihak yang membantu.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. A., & Mannakkara, S. (2024). Phased post-disaster recovery challenges: 2016–2017 floods and landslides in Colombo and Kalutara, Sri Lanka. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104728>
- Anggara Putri, N., Yunari, I., Supriatna, A., Uluputty, I., & Keamanan dan Kesematan Publik, M. (2024). *MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR* (Vol. 9, Issue 1).
- Dewi & Rohman. (2019). *Mitigasi bencana pada anak usia dini*. Early Childhood: Jurnal Pendidikan, 3(1), 68-77
- Evanly, W. W. H., Sela, R. L. E., Lakat, R. M. S., Manado, S. R., Pengajar, S., Arsitektur, J., Sam, U., & Manado, R. (2020). ANALISIS RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Spasial*, 7(3).
- Eviany, & Sutiyo. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT*.
- Hidayati, Z., & Noviana, M. (2024). *Post Landslides Recovery: Resilience of Community and Local Construction*. 9(2460–7878).
- Ingram, J., Franco, G., umbaitis-del Rio, C., & Khazai, B. (2006). *Post-disaster recovery dilemmas: challenges in balancing short-term and long-term needs for vulnerability reduction*. 9(7–8).
- MacAfee, E., de Jong, E., & Lohr, A. J. (2024). Leveraging local knowledge for landslide disaster risk reduction in an urban informal settlement in Manado, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104710>
- Perera, E. N. C., Jayawardana, D. T., & Ranagalage, M. (2019). Post Disaster Recovery Process of Landslides in Developing Countries: A Case Study of Aranayake Landslide - Sri Lanka. *Review of Environment and Earth Sciences*, 6(1), 14–23. <https://doi.org/10.18488/journal.80.2019.61.14.23>
- Rahim, A. (2022). *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Pascabencana Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Riska, D. (2020). *PERAN BPBD DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KRUKUT TAMANSARI JAKARTA BARAT*.
- Rizana, W., & Zikri, A. (2021). *Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pascabencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam*.
- Rosita Dewi, R., & Rohman, A. (n.d.). ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KINERJA DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017). *IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & Kombinasi)* (S. Y. Suryandari, Ed.; Cet. 6, Vol. 1). Bandung : Alfabeta.